

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online)

Vol. 7 No. 2 (2017)

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) DI KABUPATEN BOJONEGORO**Ahmad Suprastiyo dan Musta'ana**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No. 2 Bojonegoro

Email : prastiyo82@yahoo.co.id

Abstract : *Bojonegoro regency is one of the districts that implement PNPM-PMd from 2009 until 2015. The achievement of PNPM-MPd vision at district level is also expected to be achieved at national level. But in reality the welfare of the community is still felt far from the hopes and goals of the Republic of Indonesia. This study aims to explain the effectiveness of the concept of community empowerment in an effort to improve welfare, study in Bojonegoro. The method used is qualitative approach with the observation data, interview and documentation. Determination of informants using purposive snowball sampling. Data analysis uses data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/ verifying. The results showed that for the Visi of PNPM-MPd in Bojonegoro Regency still not achieved even though the output of the program has been reached. This occurs in the output of basic social services improvement programs and the availability of economic access to poor households has not been achieved, even though these outputs have directly impacted the objects of poor communities in rural areas.*

Keywords: *PNPM-MPd, Community Empowerment, Welfare.*

Abstrak : Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan PNPM-PMd mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Tercapainya visi PNPM-MPd pada tingkat Kabupaten diharapkan juga akan tercapai pada tingkat Nasional. Namun dalam kenyataannya kesejahteraan masyarakat masih dirasa jauh dari harapan dan tujuan Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektifitas konsep pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan, studi di Kabupaten Bojonegoro. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan *purposive snowball sampling*. Analisis data menggunakan *data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/ verifying*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk Visi PNPM-MPd di Kabupaten Bojonegoro masih belum tercapai walaupun sebagian keluaran programnya sudah tercapai. Hal ini terjadi pada *output* program peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap rumah tangga miskin belum tercapai, padahal *output* tersebut yang secara langsung berdampak pada obyek masyarakat miskin di perdesaan.

Kata kunci : *PNPM-MPd, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan.*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat secara umum merupakan tujuan Negara Republik Indonesia, hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara”. Kesejahteraan masyarakat juga dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat. Dalam masalah kesejahteraan tersebut masalah kemiskinan merupakan fenomena yang sulit untuk dipecahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan juga bagai melihat “lingkaran setan” (*virtuous circle*) yang sangat sulit untuk menemukan ujung dan pangkalnya.

Pemerintah Indonesia selama ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat menggunakan pendekatan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) mulai dari program Inpres Desa Tertinggal (IDT) tahun 1993, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tahun 1998, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) tahun 1999 dan pada tahun 2007 diluncurkanlah PNPM Mandiri sebagai program pemberdayaan masyarakat dan program ini merupakan pengembangan yang lebih luas (*scaling up*) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: 1) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, 2) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (*capacity building*), dan 3) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan. Pada tahun 2015 merupakan puncak akhir PNPM-MP diterapkan oleh pemerintah khususnya pada bidang infrastruktur desa yang sering disebut dengan pembangunan fisik sedangkan untuk dana bergulir bagi kelompok perempuan yang sering disebut dengan pembangunan non fisik atau simpan pinjam perempuan (SPP) masih berjalan sampai dengan sekarang yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat Kecamatan.

Namun, realita dilapangan dari berbagai program pemerintah yang diluncurkan dengan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) masih dirasa jauh dari harapan dan tujuan Negara Republik Indonesia yaitu kesejahteraan masyarakat. Sesuai data Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa kemiskinan pada bulan

Maret 2015 di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22%), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi pada bulan September 2014 sebesar 27,73 juta orang (10,96%). Sedangkan untuk wilayah Provinsi Jawa Timur bahwa kemiskinan pada bulan September 2015 di perkotaan mencapai 314.320 orang, bertambah 9.402 orang (2,99%) dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2015 mencapai 304.918. Di Pedesaan kemiskinan mencapai 318.443 orang pada bulan September 2015, bertambah 13.039 orang (4,09%) dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2015 mencapai 305.404 orang. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro indeks kemiskinan pada tahun 2015 mencapai 193.990 orang, bertambah 3.090 orang (0,23%) dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 sebesar 190.900 orang, www.bps.go.id.

Sesuai dengan Keputusan Menkokesra Republik Indonesia Nomor: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum PNPM Mandiri, dinyatakan bahwa PNPM Mandiri ialah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah “program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan”, (Dirjen PMD, 2014). PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1998 sebelum kebijakan sinkronisasi program tentang PNPM Mandiri tahun 2007.

Adapun pemberdayaan menurut Hogan (2000), menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu: 1) menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan, 2) mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan, 3) mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek, 4) mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan, dan 5) mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini ialah keluaran (*output*) PNPM-MPd. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive snowball sampling*, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer sebanyak 19 informan yang terdiri dari: 1) Kepala Bidang Pengembangan dan Pembangunan Desa berjumlah 1 orang, 2) Mantan Kepala Bidang Pengembangan dan Pembangunan Desa berjumlah 1 orang, 3) UPK Kecamatan yang terdiri dari Ketua berjumlah 5 orang, Sekertaris berjumlah 5 orang, Bendahara berjumlah 5 orang dan Kasir berjumlah 2 orang.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam menganalisa menggunakan teknik analisis data interaktif Model Miles and Huberman, yang mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display and conclusion drawing/verifying*” (dalam Sugiyono 2013). Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dapat dijelaskan melalui keluaran (*output*) program yang telah tercapai, sehingga dengan tercapainya keluaran program juga akan tercapai visi program yaitu “tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan”. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan PNPM-MPd mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, sehingga *output* PNPM-MPd di Kabupaten Bojonegoro telah bisa diukur atau dirasakan oleh sasaran program PNPM-MPd.

Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM), kelompok perempuan dan kelompok masyarakat adat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pelestarian.

Peningkatan keterlibatan RTM, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat mulai tahap perencanaan, pengawasan sampai dengan pelestarian merupakan upaya pemberdayaan dan rasa memiliki semua unsur masyarakat terhadap program. Pada tahap perencanaan diharapkan kegiatan program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat miskin khususnya. Pada tahap pelaksanaan kegiatan program, semua pekerja harus dari masyarakat desa setempat khususnya masyarakat miskin dengan harapan mengurangi pengangguran. Sedangkan untuk pengawasan dilakukan oleh semua unsur masyarakat yang ada di desa sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pada tahap pemeliharaan hasil kegiatan program dilaksanakan oleh Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana Desa (TP3D) yang berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil-hasil kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan, kegiatan dan pelaporan. Hasil laporan pemeliharaan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa. Tim Pemeliharaan dalam menjalankan fungsinya didukung dengan dana yang telah dikumpulkan atau yang berasal dari swadaya masyarakat setempat.

Berdasarkan data *output* program tersebut bahwa ada keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM), Kelompok Perempuan dan Kelompok masyarakat mulai tahap perencanaan yaitu dalam kegiatan Musyawarah Dusun (Musdus) Penggalan Gagasan, Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan, dan musyawarah prioritas usulan pada tingkat kecamatan yang dihadiri oleh delegasi masing-masing desa yang dipilih pada saat Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan. Pada tahap pelaksanaan yaitu dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana (fisik), pekerja dari kegiatan tersebut ada dari unsur RTM, sedangkan kelompok perempuan dalam pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dana bergulir.

Selanjutnya pada tahap pengawasan yaitu pada kegiatan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban. Sedangkan pada tahap pelestarian, lebih cenderung pemerintah desa yang melakukan. Namun kegiatan itu semua meningkat pada awal program, sedangkan pada akhir-akhir program keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM), Kelompok Perempuan dan Kelompok masyarakat menurun.

Adanya keterpaduan sistem pembangunan partisipatif model PNPM-MPd dan program sejenis kedalam sistem pembangunan reguler.

Keterpaduan sistem pembangunan partisipatif model PNPM-MPd dan program sejenis kedalam sistem pembangunan reguler merupakan *output* kedua dari PNPM-MPd yang mengintegrasikan program pembangunan reguler yang ada di Desa dengan program PNPM-MPd melalui sistem pembangunan partisipatif, yaitu musyawarah desa 1 pada PNPM-MPd dengan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana 1 (satu) tahunan berikutnya atau rencana (N+1). Rencana tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes.

Berdasarkan data ada keterpaduan sistem pembangunan partisipatif model PNPM-MPd kedalam sistem pembangunan reguler, di desa misalnya pada saat PNPM-MPd masih ada, Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan setiap tahun anggaran untuk merencanakan kegiatan pembangunan yang didanai oleh semua program yang telah ada, diintegrasikan dengan tahapan program PNPM-MPd yang dimulai dari penggalian gagasan pada tingkat dusun yang agendanya ialah menggali masukan/ usulan dari masyarakat terkait kebutuhan mereka untuk pembangunan yang akan dikerjakan di Desanya, untuk diusulkan pada musyawarah perencanaan ditingkat desa (musyawarah desa 1) yang agendanya ialah pemetaan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh masing-masing program yang ada di desa, serta penentuan prioritas kegiatan pembangunan yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, KPMD, dan LPMD.

Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa

Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa merupakan *output* ke tiga PNPM-MPd, bahwa dengan terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa semua perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pembangunan selalu melibatkan semua unsur masyarakat.

Berdasarkan data telah terlembaga sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa. Di desa sistem pembangunan partisipatif selalu dilaksanakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) pada setiap tahapan kegiatan yang melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian. Sedangkan untuk antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Terjadinya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, kelembagaan pemerintahan lokal khususnya pemerintahan desa dalam fasilitasi pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan.

Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, kelembagaan pemerintahan lokal khususnya pemerintahan desa dalam fasilitasi pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan dilakukan melalui pelatihan pelaku PNPM-MPd yang terlibat seperti Pelatihan KPMD/K, Kader Teknik, LPMD, Tim 11, Kerjasama Desa, BKAD, PL, UPK dan Unit Tim Kerja lainnya serta pelatihan BPD, Kades, Sekdes dan Perangkat Desa lainnya yang diharapkan, yaitu: 1) dipahaminya latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan dan tahapan atau mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan; 2) dipahaminya peran, tugas dan tanggungjawab pelaku; 3) bertambahnya keterampilan melakukan teknik-teknik fasilitasi pertemuan masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan partisipatif termasuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan; 4) bertambahnya keterampilan memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada masyarakat agar mampu mengelola PNPM Mandiri Perdesaan secara mandiri; 5) bertambahnya kemampuan administrasi dan pelaporan yang diperlukan; 6) bertambahnya kemampuan pelaku dalam menyusun rencana kerja; 7) dipahaminya langkah-langkah fasilitasi dalam rangka pengkajian keadaan desa, penyusunan rancangan RPJMDes dan RKPDDes sebagai bagian dalam dukungan perencanaan pembangunan partisipatif; 8) dipahaminya pola penanganan pengaduan dan masalah; 9) dipahaminya pola pemantauan dan evaluasi.

Berdasarkan data ada peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam fasilitasi pembangunan, semua pelaksana yang terlibat dalam PNPM-MPd diberikan pelatihan peningkatan kapasitas yang diharapkan memahami peran, tugas dan tanggung jawab pelaku PNPM-MPd, dan pada setiap tahapan pelaksanaan PNPM-MPd pelaku PNPM-MPd selalu diberi pelatihan, misalnya Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa, LPMD, BPD, KPMD, TPK, PKK, yang memprioritaskan pembangunan berwawasan lingkungan. Hal tersebut dapat dijelaskan pada tahap perencanaan (Musdes 1 dan Musrenbangdes) yang dilakukan oleh pemerintah desa pada setiap tahun, KPMD memfasilitasi proses penggalan gagasan pada setiap musyawarah dusun, memfasilitasi juga pada Musdes 1 atau Musrenbangdes terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.

Berfungsinya dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM-MPd bagi masyarakat.

Hasil kegiatan PNPM-MPd diharapkan bermanfaat bagi masyarakat perdesaan, mulai dari kegiatan sarana dan prasarana (fisik) dan kegiatan dana bergulir atau simpan pinjam perempuan (SPP). Berdasarkan data hasil kegiatan PNPM-MPd sangat bermanfaat bagi masyarakat, misalnya sarana dan prasarana yaitu pembangunan drainase, jalan paving, jembatan, TPT, gedung TK, gedung PAUD, sedangkan untuk akses ekonomi ialah Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM.

Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM merupakan *output* ke enam PNPM-MPd, bahwa dalam memberikan akses ekonomi terhadap RTM telah ada lembaga pengelola dana bergulir pada tingkat kecamatan yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada tingkat Kecamatan.

Berdasarkan data telah ada lembaga pengelolaan dana bergulir yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada tingkat kecamatan. Sedangkan untuk sekarang setelah PNPM-MPd tidak ada pada tahun 2015, dana bergulir/ SPP telah berbadan hukum Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), sesuai dengan surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: B27/Kemenko/Kesra/I/2014 tertanggal 31 Januari 2014, tentang pemilihan bentuk badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (dana modal bergulir PNPM-MPd). Namun keterkaitan dengan kesediaan akses ekonomi terhadap RTM belum terkelola dengan baik, hal ini terlihat dari pengguna kelompok SPP yang dari unsur RTM belum ada. Dikarenakan SPP salah satu kriteria selain RTM, ialah mempunyai usaha/ produktif. Sehingga kelompok SPP lebih banyak dari unsur orang yang mempunyai usaha/ produktif dan bisa membayar angsuran pinjaman setiap bulannya.

Terbentuk dan berkembangnya kerja sama antar desa dalam pengelolaan pembangunan.

Terbentuk dan berkembangnya kerja sama antar desa dalam pengelolaan pembangunan merupakan *output* ke tujuh PNPM-MPd, diharapkan setiap pembangunan yang melibatkan lintas/ antar desa dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dipilih pada musyawarah tingkat kecamatan beranggotakan dari unsur kepala desa.

Berdasarkan data telah terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa dalam pengelolaan pembangunan yaitu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), telah menghasilkan musyawarah pembangunan yang melibatkan antar desa, contohnya pembangunan jembatan penghubung antar desa, pembangunan drainase persawahan antar desa.

Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan merupakan *output* ke delapan/ terkahir, diharapkan semua pemangku kepentingan mulai dari pihak pemerintah, swasta, dan lembaga lainnya ikut mempunyai rasa tanggungjawab sosial terhadap penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

Berdasarkan data bahwa peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan masih belum maksimal. Masih berorientasi pada pembangunan sarana dan prasarana (fisik).

Tercapainya VISI PNPM-MPd “tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan”

Dengan tercapai *output*/ keluaran program, diharapkan tercapainya visi program yaitu tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan, kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Berdasarkan data bahwa metode atau alat ukur untuk mengetahui apakah visi PNPM-MPd telah tercapai belum ada, sehingga untuk mengetahui apakah visi tersebut telah

tercapai ataukah belum peneliti melakukan wawancara dan studi dokumen terkait obyek penelitian. Hasil wawancara dengan para pelaku PNPM-PMd, studi dokumen hasil program bahwa Visi PNPM-MPd “tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan” belum tercapai, tetapi untuk tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum ada peningkatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) masih belum tercapai, walaupun sebagian *output* program telah tercapai.

1. Ada peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM), Kelompok Perempuan dan Kelompok masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian, namun hal tersebut terjadi pada saat awal program, sedangkan pada akhir program partisipasinya menurun.
2. Terjadi keterpanduan sistem pembangunan partisipatif model PNPM-MPd kedalam sistem pembangunan reguler di Desa, semua kegiatan pembangunan terintegrasi pada satu perencanaan.
3. Telah ada lembaga sistem pembangunan partisipatif di Desa dan antar Desa.
4. Ada peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam fasilitasi pembangunan, dengan telah terlaksananya pelatihan-pelatihan kepada lembaga dan pelaku PNPM-MPd. Sehingga pada setiap tahapan pelaksanaan PNPM-MPd dalam pembangunan memprioritaskan berwawasan lingkungan.
5. Hasil kegiatan PNPM-MPd sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya terkait sarana dan prasarana yaitu pembangunan drainase, jalan paving, jembatan, TPT, gedung TK, gedung PAUD, sedangkan untuk akses ekonomi ialah Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
6. Telah ada lembaga pengelolaan dana bergulir yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada tingkat kecamatan. Sedangkan untuk saat ini berubah menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), Namun keterkaitan dengan kesediaan akses ekonomi terhadap RTM belum terkelola dengan baik.
7. Telah terbentuk badan kerjasama antar desa yaitu BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) pada PNPM-MPd.
8. Belum maksimalnya peran para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
9. Visi PNPM-MPd “tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan” belum tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Suharto, Edy. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama.

Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
www.bps.go.id